

## POLA KOMUNIKASI HUMAS SEKRETARIAT DPRD DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN

*Pattern of Communication of Private Regency of DPRD Secretariat in Delivering Information to the Community of Katingan Regency*

---

Sirajul Rahman <sup>1\*</sup>

Alif Fajar Laduni <sup>2</sup>

<sup>\*12</sup>Universitas Muhammadiyah  
Palangkaraya, Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah, Indonesia

\*email:

[sirajulrahman@umpr.ac.id](mailto:sirajulrahman@umpr.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Komunikasi Humas Sekretariat DPRD Dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat Kabupaten Katingan, karena DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menyaring aspirasi dan menyampaikan informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data dengan Observasi Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan prosedur analisis data kualitatif yaitu penggalian makna, penggambaran penjelasan dan penetapan data konteksnya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan dalam penelitian ini Pola Komunikasi Humas Sekretariat DPRD Dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat Kabupaten Katingan dengan penyebaran kepada masyarakat yang dilakukan oleh Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penciptaan citra positif dimasyarakat. Peran serta Humas dalam tumbuh dan berkembangnya stabilitasi DPRD Kabupaten Katingan sebagai sebuah unsur penyelenggara pemerintah daerah serta dalam pencapaian tujuan instansi sangat besar. Penyebaran informasi dilakukan secara berencana dan tersusun dalam program-program yang menggunakan dasar-dasar kehumasan dalam pelaksanaannya. Hambatan pola komunikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan kurangnya koordinasi Pimpinan anggota DPRD Kabupaten Katingan.

---

### Kata Kunci:

Komunikasi  
Informasi  
Masyarakat

### Keywords:

Communication  
Information  
Public

### Abstract

*This study aims to find out how the PR Communication Patterns of the DPRD Secretariat in Delivering Information to the Katingan Regency Community, because the DPRD is an organizing element of the regional government in filtering aspirations and conveying information. The method used in this research is descriptive qualitative where the technique of collecting data is by observing interviews and documentation. Data analysis used qualitative data analysis procedures, namely extracting meanings, describing explanations and determining the context of each data. The results showed that in this study the Public Relations Communication Patterns of the DPRD Secretariat in Delivering Information to the Community of Katingan Regency with the dissemination to the community carried out by the Public Relations of the DPRD Secretariat of Katingan Regency had a very large influence on creating a positive image in society. The role of Public Relations in the growth and development of the stability of the Katingan Regency DPRD as an element of local government administration and in achieving agency goals is very large. The dissemination of information is carried out in a planned and structured manner in programs that use the principles of public relations in their implementation. Barriers to the communication patterns of the Katingan Regency DPRD Secretariat lack of coordination between the Leaders and members of the Katingan Regency DPRD.*

---

## PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki struktur dan lapisan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, hal ini tergantung pada kompleksitas masyarakat itu sendiri. Semakin besar perbedaan kebudayaan yang mereka miliki, maka semakin rumit proses-proses sosial yang dapat dilakukan. Oleh karena itu komunikasi yang baik, sangat diperlukan untuk mempermudah proses sosialisasi

dalam lingkungan masyarakat. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, maupun gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara verbal/lisan seperti berbicara secara langsung dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kedua pihak, maupun dengan cara non verbal apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti dengan cara menggunakan bahasa

tubuh atau gerak badan seperti menganggukan kepala, menggelengkan kepala dan menunjukkan ekspresi wajah dengan tersenyum. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan produk regulasi yang bertujuan memberikan jaminan memperoleh informasi publik dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada proses penyelenggaraan negara. Hubungan Masyarakat (Humas) memiliki Peran dan fungsi yang penting dalam pengembangan organisasi. Peran tersebut menuntut organisasi untuk membangun hubungan baik dengan publik, sehingga di perlukan Humas yang menangani masalah tersebut agar organisasi atau lembaga tidak mengecewakan publik. Humas mempunyai tugas menciptakan, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki Citra organisasi atau lembaga di mata publik. Guna memenuhi tanggung jawab sosial, organisasi atau lembaga melayani kepentingan publik dalam kebutuhan, keinginan, dan kepentingan. Humas selalu berusaha menjaga keharmonisan hubungan dengan publik baik internal maupun eksternal. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang .No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu

: (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Melihat kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas komunikasi dalam pelaksanaan fungsi DPRD; artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat menentukan terjalannya fungsi DPRD. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan efektifitas komunikasinya maka Sekretariat DPRD harus dapat menunjukkan kinerjanya yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD, mulai dari perencanaan, proses administrasi, komunikasi dan pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Humas di sekretariat DPRD memiliki peran penting yaitu, sebagai mediator dan fasilitator untuk menjembati semua keluhan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif dan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat, sesuai visi dan misi sekretariat DPRD Kabupaten Katingan yaitu mewujudkan pelayanan yang prima dalam membantu penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Katingan serta pengelolaan informasi dan berita yang sangat penting dalam proses penyampaian pesan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pola Komunikasi Humas Sekretariat DPRD Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Kabupaten Katingan".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Dasar Humas (Public Relations)**

Humas atau public relations merupakan fungsi manajerial yang membangun dan memelihara hubungan timbal balik yang baik antara organisasi dan publiknya melalui komunikasi yang strategis (Cutlip, Center & Broom, 2006). Menurut Dozier & Broom (1995), humas berperan dalam memediasi kepentingan internal organisasi dan ekspektasi eksternal publik. Dalam konteks lembaga pemerintahan seperti DPRD, humas memiliki peran ganda: sebagai penyampai informasi (information disseminator) dan sebagai penjaga citra institusi (image builder). Fungsi ini menjadikan humas sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat (Effendy, 2005).

### **Pola Komunikasi dalam Kehumasan Pemerintahan**

Pola komunikasi merujuk pada alur dan bentuk hubungan komunikasi yang terjalin dalam suatu sistem. Littlejohn dan Foss (2009) menjelaskan bahwa pola komunikasi dapat berbentuk linear, interaksional, dan transaksional. Sementara itu, dalam ranah komunikasi organisasi, pola komunikasi internal dan eksternal turut menentukan efektivitas pengelolaan informasi (Goldhaber, 1993). Dalam konteks humas pemerintah, model komunikasi dua arah simetris yang dikemukakan oleh Grunig dan Hunt (1984) dianggap ideal, di mana terjadi proses komunikasi dua arah yang seimbang antara lembaga dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih banyak instansi pemerintah yang menggunakan model satu arah (public information model) yang berfokus pada penyebaran informasi tanpa dialog yang memadai.

### **Strategi dan Media Komunikasi Humas Pemerintah Daerah**

Pemilihan strategi komunikasi sangat memengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Menurut Wilcox dan

Cameron (2012), strategi komunikasi mencakup pemetaan pesan, segmentasi audiens, pemilihan media, dan penilaian dampak komunikasi. Dalam era digital, humas pemerintah mulai memanfaatkan media sosial, portal resmi, serta media massa lokal sebagai saluran komunikasi strategis (Nurudin, 2017). Di daerah seperti Kabupaten Katingan, media komunikasi tradisional seperti radio lokal dan pertemuan tatap muka (misalnya musyawarah atau forum warga) masih relevan dan efektif. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang berbasis pada kearifan lokal dan partisipatif perlu dikembangkan.

### **Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi Publik**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, termasuk DPRD. Dalam konteks ini, humas berperan penting dalam menjamin hak masyarakat terhadap informasi yang transparan dan akuntabel. Menurut teori komunikasi partisipatif (Servaes, 2008), efektivitas komunikasi pemerintahan meningkat ketika masyarakat dilibatkan sebagai subjek dalam proses komunikasi, bukan sekadar objek penerima informasi. Keterlibatan publik dalam diskusi kebijakan, musrenbang, dan forum aspirasi menjadi indikator keberhasilan pola komunikasi yang partisipatif.

### **Konteks Lokal: Humas dan Masyarakat Kabupaten Katingan**

Kabupaten Katingan sebagai wilayah dengan karakteristik sosio-kultural khas memerlukan pendekatan komunikasi yang kontekstual. Studi oleh Puspitasari (2020) menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan dalam literasi media, akses informasi, dan keterbatasan infrastruktur komunikasi. Oleh karena itu, humas DPRD dituntut untuk merancang pola komunikasi yang responsif terhadap

kondisi masyarakat lokal, termasuk mempertimbangkan bahasa, budaya, dan jalur informal yang lebih akrab bagi masyarakat.

## **METODOLOGI**

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomenafenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui secara langsung Pola Komunikas Humas Sekretariat DPRD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Kaitngan. Teknik Pengumpulan Data Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah- langkah berikutnya sampai dengan penarikan simpulan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode dibawah ini :

- A. Observasi adalah penelitian yang di lakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai Pola Komunikasi yang digunakan oleh Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- B. Wawancara Mendalam, yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul tentang hal - hal yang berkaitan dengan Peranan Humas Sekretariat DPRD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- C. Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan bahan dalam bentuk dokumen yang relevan berdasarkan tema penelitian. Metode ini membantu penulis dalam untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengumpulan Data Informasi** Salah satu tugas Humas Sekretariat DPRD kabupaten Katingan adalah dengan menghimpun data-data yang akurat serta fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, termasuk di dalamnya adalah siapa saja sasarannya, bagaimana opini masyarakat sehingga dapat digali kemauan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian merumuskan apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana tindak penyelesaiannya. Selain itu program-program DPRD termasuk didalamnya berbagai kegiatan-kegiatan umum yang dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Katingan disampaikan secara transparan kepada pihak media dan masyarakat untuk menjalin kerja sama yang baik terhadap semua pihak.

Senada dengan uraian di atas berikut wawancara dengan Bapak Drs. Kabul Mustiman selaku Kepala Sekretariat DPRD dalam wawancara bersama penulis

menggunakan Pola Komunikasi sebagai berikut “ Pola Komunikasi Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat bersifat tersentral yang artinya pimpinan tertinggi/Sekwan memberikan informasi kepada masyarakat secara benar dan terukur setelah mendapatkan data yang akurat dari bagian yang membidangi Kehumasan Di Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan. Hal ini wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Katingan agar tidak terjadi penyampaian informasi yang salah kepada masyarakat” Hal tersebut juga ditambahkan oleh Hal Bapak Ramang selaku Kasubag Kepegawaian, Perpustakaan dan Dokumentasi sebagai berikut: “ Peran Humas dalam merespon opini publik wajib berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan serta Sekwan guna mencari informasi yang benar terkait dengan opini publik tersebut “Dalam penyebaran informasi juga Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan Bekerjasama dengan beberapa pihak seperti yang dijelaskan oleh bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H selaku Kepala Sub bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol sebagai berikut : “ Humas Sekretariat DPRD ada bekerjasama dengan media online dan media cetak yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi anggaran Sekretariat DPRD “Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa data-data yang telah dikumpulkan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Katingan pada dasarnya untuk menunjang berbagai kegiatan-kegiatan DPRD dan pemerintahan Kabupaten Katingan dan untuk menjalin hubungan yang baik dengan media. Selain itu Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan selalu memberikan informasi yang mempunyai nilai berita yang dinilai tinggi dan penting untuk dipublikasikan.

Aspirasi dari masyarakat kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Katingan harus dapat dikelola dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ada. Masyarakat yang

akan menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Katingan selalu ingin dapat bertemu dan mendapat tanggapan secara langsung, namun terkadang mereka tidak memperhatikan prosedur dan birokrasi yang berlaku di Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan mengenai tata cara atau mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan. Menjadi salah satu tugas Humas di Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan untuk dapat melayani aspirasi dari masyarakat dengan baik. Agar aspirasi masyarakat ini tepat pada sasaran dan bidangnya maka harus ditangani dengan strategi kehumasan secara efektif.

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H selaku Kepala Sub bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol sebagai berikut : “ Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terutama kepada DPRD dengan langsung hadir dan bertemu dengan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan kemudian menyampaikan aspirasinya dan juga bisa melalui surat tertulis Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan kemuda, dengan demikian Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan dapat merespon aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dengan mekanisme yang berlaku. Ketika aspirasi masyarakat disampaikan kepada DPRD dan pemerintah Kabupaten Katingan, kami akan segera menampung, menanggapi dan akan segera menindak lanjuti aspirasi tersebut. Namun yang perlu diketahui bahwa apapun aspirasi dan keinginan masyarakat tidak serta merta langsung dijalankan begitu saja, kami sebelumnya harus mengidentifikasi hal tersebut dalam menanggapi opini publik yang sesuai atau tidak dengan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah “

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H selaku Kepala Sub bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol dapat diketahui bahwa Humas sebagai media penyalur aspirasi

masyarakat Katingan terhadap pemerintah berupaya untuk mewujudkan berbagai aspirasi atau keinginan masyarakatnya namun perlu diketahui bahwa sebelumnya aspirasi tersebut dilakukan identifikasi guna melihat apakah aspirasi tersebut telah sesuai atau tidak dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Katingan itu sendiri. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha Humas dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan saling pengertian antara Pemerintah kabupaten Katingan dengan masyarakatnya.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ramang selaku Kasubag Kepegawaian, Perpustakaan dan Dokumentasi sebagai berikut :

"Humas DPRD Kabupaten Katingan merupakan salah satu unsur pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk menampung aspirasi masyarakat di Kabupaten Katingan, dan menjadi tugas Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan untuk dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan harus dapat diakomodasi dan dikelola dengan baik sesuai bidang permasalahan yang ada."

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah kabupaten Katingan terutama DPRD akan ditampung dan diakomodasi oleh Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Katingan. Namun berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti di lapangan terkadang aspirasi masyarakat tersebut tidak selamanya dapat terpenuhi atau dengan kata lain tanggapan dari Humas Kabupaten Katingan dinilai tidak memuaskan dan tidak memenuhi aspirasi.

Kegiatan hubungan masyarakat (humas) Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. Ciri hakiki dari komunikasi dalam

Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan adalah komunikasi yang bersifat dua arah timbal balik. Komunikasi yang bersifat timbal balik ini sangat penting dan mutlak harus ada dalam kegiatan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan, dan terciptanya feedback merupakan prinsip pokok dalam Humas. Fungsi Humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah antara organisasi yang diwakilinya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Katingan dengan publik sebagai khalayak sasaran yang pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai.

Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Katingan kepada masyarakatnya. Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan disamping bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan lalu lintas arus informasi ke dalam dan ke luar, ia juga berfungsi sebagai penyaring atau filter dari komunikasi timbal balik dengan tujuan untuk menciptakan dan membina stabilitas sosial. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H selaku Kepala Sub bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol sebagai berikut :

"Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan melakukan komunikasi yang bersifat dua arah. Di dalam kegiatan media relations ini kami berupaya untuk menginformasikan kepada publik eksternal maupun internal melalui media massa. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pemberitaan negatif yang berdampak dengan citra DPRD Kabupaten Katingan ".Berdasarkan penjelasan dari Bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H di atas dapat diketahui bahwa Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan melakukan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mewujudkan penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Katingan terkait kegiatan atau program-

program kerja dan kebijakan dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dimana hal tersebut berdampak positif bagi terciptanya keterbukaan informasi dan meminimalisir berbagai pemberitaan negatif terhadap Pemerintah Daerah kabupaten Katingan.

Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan mempunyai tugas diantaranya sebagai juru bicara pemerintah daerah, melakukan penyebaran informasi, dan melakukan hubungan timbal balik antar pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah, melakukan hubungan intern dengan satuan dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, melaksanakan usaha untuk peningkatan peliputan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut seluruh aparatur Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan dituntut agar melakukan penyebaran.

Bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H selaku Kepala Sub bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol sebagai berikut : “ Informasi yang disampaikan oleh Humas kepada masyarakat terkait kegiatan DPRD Kabupaten Katingan baik yang bersifat rapat – rapat dikantor maupun kegiatan – kegiatan DPRD Kabupaten Katingan yang turun langsung kelapangan meninjau kegiatan atau laporan / aduan masyarakat sehingga bisa diselesaikan dengan cepat dan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.” Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H di atas dapat diketahui bahwa dalam penyebaran informasi pihak Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan sebelumnya melakukan beberapa langkah-langkah atau proses sebelum menyebarkan sebuah informasi terkait kegiatan, program-program DPRD Kabupaten Katingan yang dimulai dengan menemukan permasalahan, melakukan perencanaan, melakukan komunikasi dan terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap informasi

yang disebarkan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyebaran informasi yang disampaikan kepada media dapat dipertanggung jawabkan dan untuk dapat dijelaskan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang sebuah informasi terkait sebuah kebijakan.

Dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan mengalami hambatan seperti yang di kelaskan oleh Bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H selaku Kepala Sub bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol sebagai berikut :

“Hambatan pola komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah kurangnya koordinasi dengan baik antara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan serta bagian Humasnya”

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Fransiskus Xaverius Sinaga, S.H di atas dapat diketahui bahwa Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan mengalami hambatan dalam menyampaikan Informasi kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Pola Komunikasi Humas Sekretariat DPRD Dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat Kabupaten Katingan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Penyebaran informasi kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penciptaan citra yang positif di masyarakat. Peran serta Humas dalam tumbuh dan berkembangnya stabilisasi DPRD Kabupaten Katingan sebagai sebuah unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta dalam pencapaian tujuan instansi sangat besar. Penyebaran informasi dilakukan secara berencana dan tersusun dalam program-program yang menggunakan dasar-dasar kehumasan dalam pelaksanaannya.

2. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjalin hubungan baik dan harmonis antara pihak DPRD dengan pemerintah Daerah, DPRD dengan Masyarakat Kabupaten Katingan dengan media massa (pers), dengan cara menjembatani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan insan pers dalam penyediaan informasi yang lengkap dan akurat dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Peran Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan dalam membentuk citra positif DPRD Kabupaten Katingan dilaksanakan secara tidak langsung atau berada di balik layar, karena Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan memberikan informasi-informasi mengenai kegiatan DPRD.

## REFERENSI

- Amelia, R. R., & Yuwono, D. T. (2024). Supporting learning information system through knowledge management optimization using long short-term memory method. *KnE Social Sciences*, 2024, 361–371.
- Arifin, A. (1984). *Strategi komunikasi: Sebuah pengantar ringkas*. Bandung: Armico.
- Cangara, H. (2013). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective public relations (9th ed.)*. Pearson Education.
- Dokumen BKKBN. (2017). *Strategi komunikasi dan advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga*.
- Dokumen BKKBN. (2017). *Strategi kreatif isi pesan dan media KIE*.
- Dozier, D. M., & Broom, G. M. (1995). *Using research in public relations: Applications to program management*. Prentice Hall.
- Effendy, O. U. (1998). *Humas suatu studi komunikologis (Cet. ke-4)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, teori & filsafat komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, O. U. (2005). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Goldhaber, G. M. (1993). *Organizational communication (6th ed.)*. Brown & Benchmark.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart and Winston.
- Hariyanti, A., & Rahayu, T. P. (2024). Implementation of good governance in improving public service performance at BNNP Central Borneo. *Journal of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(1), 1–6.
- Kriyantono, R. (2012). *Teknik praktis riset komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relation, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of communication theory (Vols. 1 & 2)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan, M. A. (2008). *Manajemen media penyiaran: Strategi mengelola radio & TV*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurudin. (2017). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pratama, M. A., & Mustikaningsih, W. (2022). Politik kesejahteraan; Analisa kesejahteraan masyarakat dalam kondisi triple disruption (kajian para pedangang kuliner lokal desa wisata; antara pelabuhan Rambang dan dermaga Kereng Bengkirai). *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 430–441.

- Puspita, Y. (2015). Pemanfaatan new media dalam memudahkan komunikasi dan transaksi pelacur gay. *Jurnal Pekommas*, 18(3), 203–212.  
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2015.1180306>
- Puspitasari, D. (2020). Strategi komunikasi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik di daerah 3T. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 34–45.  
<https://doi.org/10.24002/jik.v17i1.3210>
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen public relations dan media komunikasi: Konsepsi dan aplikasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, P. M. (2012). *Efektivitas iklan layanan masyarakat di televisi dalam mempengaruhi sikap khalayak*. Jakarta: Universitas Indonesia, FISIP UI.
- Servaes, J. (2008). *Communication for development and social change*. SAGE Publications.
- Severin, W. J., & Tankard, J. W., Jr. (2005). *Teori komunikasi: Sejarah, metoda, dan terapan di dalam media massa (Ed. ke-5, terj.)*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretatif, interaktif dan konstruktif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Surya, R. A., Ridho, F., & Yuwono, D. T. (2024). Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap trend digital forensik pada saat pemilu Indonesia: The bibliometric analysis using VOSviewer on digital forensics trends during the Indonesian election. *Pencerah Publik*, 11(1), 33–41.
- Umar, H. (2002). *Metode riset komunikasi organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Wilcox, D. L., & Cameron, G. T. (2012). *Public relations: Strategies and tactics (10th ed.)*. Pearson.
- Yusuf, M., Bernardianto, R. B., Satia, H. M. R., Nurhasanah, N., Irwani, I., Setyoko, P. I., & Saputra, A. S. (2023). Investigating the role transformational leadership, innovative work behavior, and team member exchange on public service organization performance. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(6), e868-e868.
- Yusuf, M., Satia, M. R., Bernardianto, R. B., Nurhasanah, N., Irwani, I., Kurniasih, D., & Setyoko, P. I. (2023). Exploring the role of digital leadership and digital transformation on the performance of the public sector organizations. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1983–1990.
- Yuwono, D. T., & Hariyanti, A. (2024). Applying clustering and recommendation system for effective supervision in Central Kalimantan Inspectorate. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)*, 6(2), 367–374.